

Nasionalisme, Etnisitas,
Perubahan Sosial Dan
Integrasi Nasional

LAPORAN AKHIR PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS



**KONSTRUKSI PEMILIH MUDA DI SURABAYA
TENTANG DEMOKRASI PANCASILA**

TIM PENGUSUL

Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP.	0014057403
Prof. Warsono, M.S	0019056003
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	0025086704
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si	0016087208

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

NOPEMBER, 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Konstruksi Pemilih Muda Di Surabaya
Tentang Demokrasi Pancasila

Bidang Ilmu Penelitian : Nasionalisme, Etnisitas, Perubahan Sosial dan
Integrasi Nasional

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos. M.IP
b. NIDN : 0014057403
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
e. Nomor HP : 081332207020
f. Alamat Surel (e-mail) : maya_mstk@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Warsono, M.S
b. NIDN : 0019056003
c. Program Studi : Filsafat Pancasila.

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
b. NIDN : 0025086704
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si
b. NIDN : 0016087208
c. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Mahasiswa yang terlibat : 3 Orang

Biaya Tahun Berjalan :
(diusulkan ke PT) : Rp 11.000.000,00

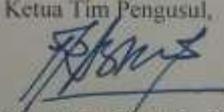
Sumber Lain : -

Surabaya, 25 Nopember 2019

Mengesahkan
Dekan F.I.H Unesa

Dr. Fuad Syanto, M.Pd.
NIP. 196304041988121001

Ketua Tim Pengusul,


Maya Mustika K.S., S.Sos. M.IP.
NIP. 197405142003122002

Menyetujui,
Ketua LPPM Unesa

Prof. Dr. Darul, M.Hum.
NIP. 196509261990022001

RINGKASAN

Munculnya fenomena kelompok-kelompok anti nasionalisme atau neo nasionalisme menggambarkan bahwa komunitas politik di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan kebebasan politik dalam kerangka kolektivitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokratisasi era reformasi merupakan awal dinamika politik di Indonesia. Masyarakat negara menginterpretasi demokrasi negara dalam kerangka pemikiran secara subyektif tanpa mengacu pada hakekat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai konteks demokrasi di Indonesia belum menjadi acuan warga negara dalam mengartikulasikan proses demokrasi di Indonesia. Jika ditinjau dari dalam proses internalisasi ideologi negara, maka proses pendidikan Pancasila dan kewarganegaran memiliki fungsi pemeliharaan nilai-nilai kehidupan bernegara. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang pemilih pemula dalam memahami demokrasi yang berazaskan Pancasila.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kegiatan penelitian dan laporan penelitian yang berjudul *Konstruksi Pemilih Muda Di Surabaya Tentang Demokrasi Pancasila* dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan Penelitian ini dapat dilaksanakan berkat dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Jajaran dekanat, Ketua Lembaga Penelitian UNESA beserta staff, yang telah memberikan dukungan sarana, prasarana, dan bantuan pengelolaan administrasi.
2. Para Mahasiswa yang bersedia menjadi bagian dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan dan laporan kemajuan penelitian ini, karena itu kami membutuhkan kritik dan saran bagi penyempurnaannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Surabaya,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB 1. PENDAHULUAN	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	27
BAB 4. METODE PENELITIAN	29
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi politik nasional telah mendorong restrukturisasi politik, usaha penegakkan hak-hak asasi manusia, serta kebebasan individu dan media massa yang berkembang di Indonesia. Perubahan itu ditandai melemahnya hegemoni negara terhadap masyarakat dan menguatnya keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan fenomena yang berkembang pada era reformasi. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam politik mendorong hadirnya berbagai unit-unit kelompok dalam masyarakat. Bentuk, identitas, ukuran, dan aktivitas tiap-tiap kelompok bervariasi. Ada yang secara tegas menyatakan diri sebagai kelompok-kelompok politik (aktor politik seperti partai politik, ormas, dan lain sebagainya), ada pula kelompok-kelompok yang berorientasi pada aktivitas sosial seperti kelompok pengajian, kelompok aktivis perempuan, aktivis lingkungan, dan sebagainya.

Variasi penguatan kelompok-kelompok masyarakat tersebut memunculkan dinamika dalam proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu tercermin dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang diwarnai berbagai bentuk euforia kebebasan hingga keraguan terhadap generalisasi demokrasi itu sendiri. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terepresentasi dengan maraknya demonstrasi, ada kalanya berakhir dengan tindakan anarki. Selain itu berbagai sengketa terkait pelaksanaan pilkada, hingga strategi politik non etis yang menjadi pilihan para politisi. Beberapa pakar politik yang berpendapat dalam media masa mengidentifikasi fenomena politik yang berkembang itu sebagai anomali politik, yang pada akhirnya perlu ditelaah secara skeptis dan kritis, agar dapat ditemukan solusi alternatif untuk keluar dari kemelut demokrasi yang terjadi pada dekade terakhir ini.

Hasil riset Demos (<http://www.demosindonesia.org>), diunduh 8 Nopember 2005) menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat sipil dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam asosiasi politik, sosial, maupun keagamaan, tidak serta merta mendorong terjadinya peningkatan kualitas keterwakilan publik dalam institusi politik. Terdapat empat permasalahan umum dalam proses demokratisasi di Indonesia, yaitu: (1). Demokrasi hanya dimaknai sebagai liberalisasi politik sehingga muncul kesenjangan antara aspek esensial dengan aspek instrumental. Kebebasan membentuk partai pada akhirnya menghilangkan perwakilan yang berkualitas. (2). Problem kesenjangan antara agenda masyarakat dan

agenda parpol. Partai politik belum mampu melakukan institusionalisasi kepartaian baik di tingkat kelembagaan, parlemen, dan akar rumput. Gejala ini yang mungkin menjadi salah satu alasan partai politik merekrut artis dan "kalangan penekun agama" sebagai orang yang dicalonkannya. (3). Elit oligarkis yang selama ini mendominasi politik telah menyesuaikan diri dengan mekanisme demokrasi. Demokrasi cenderung menjadi ritualisme sedangkan esensinya tetap elitisme. (3). Tidak adanya kesatuan antara pemerintah dan representasi politik menunjukkan aktor-aktor politik yang terfragmentasi secara ideologi dan strategi. Fokus penguatan masyarakat sipil dimaknai terpisah dengan aksi-aksi politik, sehingga tidak ada *engage* atau koneksi antara *civil society* dan politisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunitas politik di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan kebebasan politik dalam kerangka kolektivitas negara. Masyarakat warga negara menginterpretasi demokrasi dalam kerangka pemikiran secara subyektif tanpa mengacu pada hakekat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesungguhnya warganegara dan masyarakat yang demokratis mempunyai hak untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga mereka memiliki kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab secara cerdas terhadap pilihannya.

Di alam demokrasi sekarang ini warganegara tidak cukup hanya memiliki pengetahuan politik dengan segala aspeknya, tetapi dituntut pula memiliki ke-cakapan-kecakapan intelektual yang secara kritis dipraktikkan seperti kecakapan mendengar, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, menilai dan mengkreasi persoalan-persoalan politik yang menjadi isu-isu publik. Selain itu, warga-negara dituntut memiliki kecakapan partisipatoris antara lain kecakapan ber-interaksi untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya, memonitor isu-isu publik bahkan diharapkan cakap mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut data KPU dalam pemilu 2014 yang akan datang diperkirakan sekitar 69 juta (Antara – 20 Juni 2012) adalah pemilih pemula. Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan partai politik dalam meraih simpati, sehingga partai yang bersangkutan mampu meraih suara yang tinggi dalam pemilu. Namun keberhasilan itu belum tentu ditunjang oleh perilaku pemilih yang menentukan pilihannya secara cerdas, karena berdasarkan data KPU menunjukkan bahwa pemilih pemu-la baik yang pernah menggunakan pilihnya maupun yang belum menggunakan pilihnya pada pemilu 2009 cenderung memilih partai-partai besar dan lama men-jadi peserta pemilu yang telah meraih

kursi cukup besar di parlemen. Selain itu, pilihan pemilih pemula lebih didasari oleh ketokohan, populeritas dan sentimen primordial.

Berdasar pilihan pemilih pemula nampaknya proses politik yang mereka lakukan belum didasari oleh kesadaran yang rasional, sehingga pemilu hanya menghasilkan perputaran elite-elite politik yang tetap dan proses regenerasi kepemimpinan politik sering dianggap gagal. Elite politik hanya berputar diantara pengurus partai, karena partai politikpun belum punya keberanian melamar dan mencalonkan elite di luar partai.

Yang memprihatinkan ialah sebagian besar pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini dikhawatirkan terjadi pada pemilu 2014 apalagi kondisi ini lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada pemilih pemula yang kurang maksimal (DIPA BPNP, 2009:3). Kondisi yang terjadi pada pemilih pemula kalau terus dibiarkan akan menghambat proses peningkatan kualitas demokrasi yang sedang dibangun di negara kita, karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan pemilih yang cerdas untuk berpartisipasi. Sebagaimana pendapat Huntington (1982:56) bahwa model demokrasi terbaik meliputi tiga tahap substansial, yakni tahap pertama perumusan dan pengembangan identitas nasional, tahap kedua pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif, dan tahap ketiga partisipasi poliitik. Dari kondisi ini pemilih pemula harus didorong agar dapat memposisikan dirinya sebagai pemilih yang memiliki kecakapan partisipatoris, karena bagaimanapun juga mereka merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengembangkan budaya politik karena sikap politiknya. Sebagaimana diungkapkan Mannheim (dalam Seymour, 2007:174) “pengalaman khusus dalam usia yang khusus menciptakan pemahaman politik yang sangat menentukan di dalam melihat mengalami-pengalaman politik di masa yang akan datang”. Untuk itu, diperlukan pendidikan politik yang memadai dalam menciptakan kecakapan partisipatoris pada pemilih pemula, sehingga partisipasi yang mereka lakukan merupakan partisipasi aktif.

Dengan adanya pemilih pemula yang cakap, akan merubah pendirian pemilih pemula untuk menolak kebiasaan partai poliitik yang selama ini hanya memanfaatkan mereka dalam mobilisasi massa dalam kampanye untuk menjaring massa, dengan memberikan uang saku, kaos agar mereka terlibat dalam poliitik. Dari kecakapan pemilih pemula yang mampu menolak dimobilisasi akan memberikan umpan balik pagi parpol dalam menentukan model sosialisasi politik. Sejalan dengan pendapat Manbridge dalam *Participation and Democratic Theory* (CICED. 2002;147) dikatakan bahwa “... *the major function of participation in theory of participatory democracy is ..an educative one,*

educative in a very widest sense”.. yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal ini dinilai sangat penting, karena dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan kepribadian yang demokratis.

Politik adalah tempat "ada bersama" (being-together) individu-individu sebagai warga sekaligus subyek, yang melaluinya disusun gagasan, dijalankan misi, dibangun nasib, direlakan pengorbanan, diukir sejarah, dan dirangkai makna bersama. Di dalam ruang bersama itu dibangun simpul-simpul (knots) yang mengikat individu-individu sebagai komunitas. Ruang itu adalah dialektika antara interioritas—yaitu makna-makna bersama yang diinternalisasikan para aktor politik—dan ekterioritas—yaitu makna individual yang disumbangkan untuk "ruang bersama" (Jean-Luc Nancy, 1993).

Di dalam komunitas, setiap individu diikat oleh simpul-simpul bahasa, tindakan, perilaku, pernyataan, dan makna, yang diekspresikan melalui aneka media puisi, slogan, moto, atribut, atau lagu. Politik adalah perangkaian ucapan, tindakan, dan pernyataan menjadi simpul, yang secara terus-menerus disimpul ulang melalui dialektika kekuatan individu dan komunitas. Politik adalah tegangan antara dua kekuatan ini. Tanpa simpul, komunitas politik tak lebih dari kerumunan individu tanpa ikatan nilai bersama.

Karena itu, individu sebagai warga harus ditransformasikan menjadi subyek melalui proses "subyektifikasi", yaitu produksi serangkaian tindakan, ungkapan, dan ekspresi di dalam medan pengalaman yang ada, tetapi mampu mere-konfigurasi medan pengalaman itu, dengan menawarkan nilai pengalaman baru dalam konstelasi politik yang terus berubah. Melalui komunitas politik inilah, "yang tak dihitung" di dalam wacana politik menemukan ruang eksistensinya (Ranciere, 1995).

Ruang politik adalah arena yang di dalamnya berlangsung pertarungan ideologis di antara komunitas-komunitas politik memperebutkan posisi hegemoni dalam pasar politik. Setiap kelompok politik—khususnya parpol—mengerahkan segala bentuk modal ideologis, ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik untuk memenangi pertarungan. Inilah dramaturgi politik, di mana setiap elemen politik menampilkan segala gestur politik sebagai jalan mencapai hegemoni politik.

Akan tetapi, yang terjadi kini adalah semacam desubjektivisme politik, yaitu ketika ruang pertarungan hegemoni di antara komunitas-komunitas politik melalui arena dramaturgi politik diambil alih oleh pertarungan kekuasaan di antara individu di dalam arena di belakang layar politik, yang tak tampak dan tak terakses publik. Arena politik

telah beralih dari pertarungan hegemoni di ruang publik menjadi pertarungan tak-tampak di antara individu di dalam internal parpol sendiri—*the invisible political arena*.

Eksterioritas pertarungan ideologi di antara parpol—di mana "hadir bersama" dimaknai sebagai perjuangan bersama membangun tanda, makna, dan nilai bersama—kini menjelma jadi interioritas pertarungan kekuasaan di antara aktor-aktor di dalam institusi politik itu sendiri, di mana mereka mengerahkan segala trik dan tipu daya untuk menggapai kekuasaan di dalam retakan komunitas politik, dengan meminggirkan ideologi, dan kalau perlu menyingkirkan kawan sendiri. Kekuasaan adalah masa depan ideologi kita. Oleh karena pentingnya untuk memahami orientasi politik bagi pemilih muda dalam mengembangkan budaya politik, dan sikap politik.

Dalam konteks kontribusi riset terhadap pembangngan nasional, penelitian orientasi politik pemilih muda, berkaitan dengan tema penelitian kompetitif nasional terkait tema riset pembangunan dan penguatan sosial budaya, hal ini selaras dengan rencana induk penelitian prodi PPKn yang meliputi :

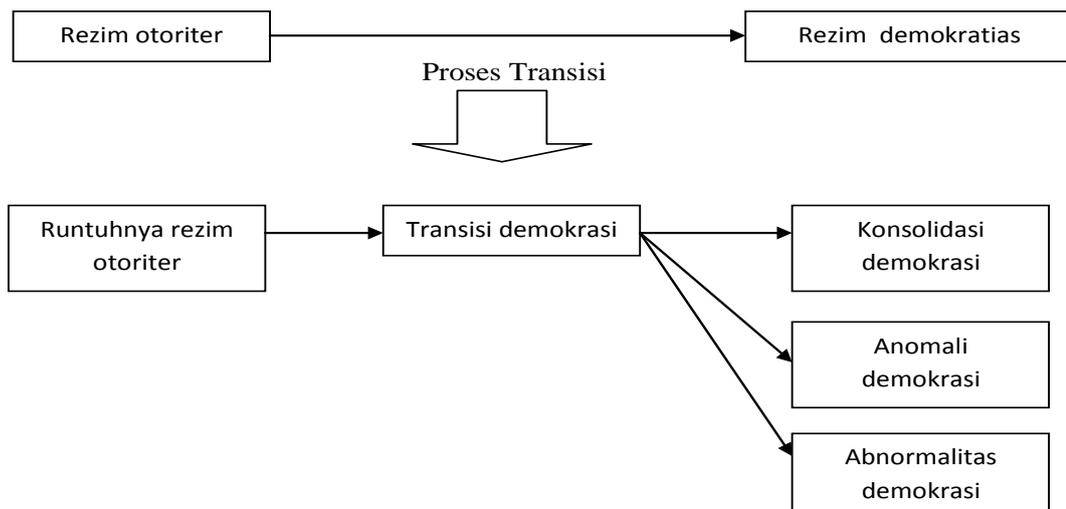
1. Penguatan identitas nasional sebagai modal sosial bangsa
2. Penguatan dan pengembangan integrasi bangsa
3. Penguatan dan pengembangan keterlibatan/partisipasi warga negara dalam kebijakan publik
4. Penguatan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kontekstual.

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana cara pandang pemilih muda dalam memahami demokrasi yang berazaskan Pancasila?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu : adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Transisi demokrasi merupakan proses perubahan masyarakat dari struktur sosial politik lama yang otoriter ke arah struktur sosial politik baru yang demokratis. Proses perubahan masyarakat tersebut senantiasa tidak dapat terlepas dari konteks (yaitu situasi dan kondisi) masyarakat dalam suatu negara. Proses perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Proses Demokratisasi

Proses transisi demokrasi sangat diarahkan untuk mengarah pada konsolidasi demokrasi, yaitu manakala struktur dan proses baru telah stabil dan menjadi kesadaran kolektif masyarakat terutama yang mengarah pada penguatan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat secara masif. Realitas di beberapa negara, proses transisi demokrasi tidak mengarah pada konsolidasi demokrasi. Fakta yang terjadi justru mengarah pada anomali demokrasi atau bahkan abnormalitas demokrasi. Anomali politik dipandang sebagai

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang pemilih pemula dalam memahami demokrasi yang berazaskan Pancasila, sehingga dengan demikian dapat diketahui sejauhmana para pemilih pemula mengartikulasikan pengetahuan dan pengalamannya menjadi sebuah cara pandang dalam berkehidupan politik warga negara. Temuan dari penelitian diharapkan dapat menjadi materi evaluasi dalam mekanisme pendidikan politik kewarganegaraan di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui cara pandang pemilih pemula dalam memahami demokrasi yang berazaskan Pancasila maka akan dapat memberikan manfaat disebagai berikut :

1. Memberikan informasi dalam mengembangkan prototype materi pendidikan politik yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan.
2. Mengembangkan modul pendidikan politik bagi generasi muda, sehingga dinamika politik dapat direspon dengan sikap yang mendorong integrasi bangsa.

C. Target Capaian Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian			
			TS ¹⁾	TS+1	TS+...	TS+n
1	Publikasi ilmiah ²⁾	Internasional				
		Nasional Terakreditasi				
2	Pemakalah dalam temu ilmiah ³⁾	Internasional				
		Nasional	Ada			
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional				
		Nasional				
4	<i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾	Internasional				
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾	Paten				
		Paten sederhana				
		Hak Cipta				
		Merek dagang				
		Rahasia dagang				
		Desain Produk Industri				
		Indikasi Geografis				
		Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu				
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾					
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial ⁸⁾	Ada				
8	Buku Ajar (ISBN) ⁹⁾					
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾					

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian Konstuksi Pemilih Muda Tentang Demokrasi Pancasila ini tidak hanya memfokuskan pada salah satu pendekatan saja melainkan mengkaji berbagai pendekatan yang ada baik pendekatan sosiologis (mazhab Columbia), psikologis (mazhab Michigan), dan pendekatan rasional sebagai kritik dari dua pendekatan. Nampaknya, berbagai pendekatan dalam perilaku memilih ini dapat saling melengkapi baik dalam hal penjelasan maupun kesimpulan. Berikut ini adalah uraian dari metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

A. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Universitas Negeri Surabaya. Subyek penelitian adalah mahasiswa Prodi Manajemen Angkatan 2019 sebanyak 65 mahasiswa. Alasan pemilihan subyek penelitian adalah didasarkan pada seleksi mahasiswa baru prodi S1 Manajemen merupakan

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dicatat secermat dan serinci mungkin sehingga menjadi suatu catatan lapangan. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat diungkap.

Selain itu dilakukan *Focus Group Discussions* (FGD) untuk menjaring informasi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kecakapan partisipatoris dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu dan pilukada; Membentuk *agen* bahkan *opinion leaders* yang bisa menyampaikan informasi seputar pemilu dan pilukada bagi rekan-rekannya sebagai pemilih pemula dan warga masyarakat pada umumnya; Memberikan penyadaran tentang arti pentingnya pemilu dan pilukada di negara Indonesia; Mendorong masyarakat pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pemilu.

Bagian ini juga menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemilih Muda Tentang Demokrasi Pancasila.

Pemilih muda dalam memandang Demokrasi Pancasila senantiasa dihadapkan padapraktik demokrasi dan pemerintahan di Indonesia Saat ini. Sumber literasi yang dijadikan acuan dalam menggali informasi adalah dari Internet. Berdasarkan orientasi penggalan awal terkait sumber informasi tentang Demokrasi pancasila adalah :

1. Buku sekolah/Perkuliahan
2. Sumber Internet
3. Informasi dari orang lain (Guru, Dosen, Teman/Senior, Orang Tua)

Hanya sebagian kecil dari informan yang memiliki kemauan untuk membaca sumber-sumber informasi yang berasal dari buku atau pemikiran tokoh. Dari 65 informan hanya lima orang pernah membaca buku atau literatur dari tokoh tertentu. Hal itu nampaknya yang menjadi dasar dari pemilih muda dalam memahami konsep demokrasi pancasila.

Pemahaman umum pemilih muda tentang demokrasi pancasila berorientasi pada konsepsi dasar dari demokrasi dan demokrasi pancasila. Demokrasi dan demokrasi pancasila dipandang sebagai berikut :

“Demokrasi sendiri artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. lalu diterapkan dengan adanya ideologi negara Indonesia yaitu pancasila, sehingga praktik demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila”
(Mayang Sari)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Hasnaning tentang pemahamannya demokrasi pancasila.

“Demokrasi pancasila, warga negara (rakyat) adalah pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara, hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, warga negara harus memilih pemimpin sesuai keinginan, sebagai bentuk aspirasi yang sesuai dengan amanah demokrasi”

Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Satura Abdi yang mencoba memberikan elaborasi terkait kepemimpinan dalam rgumentasinya.

“Demokrasi pancasila, memilih pemimpin dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat yang isinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, calon pemilih harus benar-benar bisa menyeleksi kandidat mana yang pantas menjadi pemimpin. Dan dalam sistem demokrasi pancasila, rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan UUD Tahun 1945”

Demokrasi juga dipahami dengan berbeda oleh Fikri Hilya, yang mencoba mengelaborasi konsep demokrasi pancasila terkait konsepsi hubungan antar warga negara.

“demokrasi pancasila adalah mekanisme hubungan yang mungutamakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga negara, bukan kepentingan perseorangan. Demokrasi pancasila sendiri lahir karena adanya musyawarah bersama”.

Belinda Novastra, mendeskripsikan demokrasi pancasila sebagai bentuk nilai ideal sehingga berorientasi pada penjelasm-penjelasan normatif tentang demokrasi pancasila.

“demokrasi pancasila bersumber dari pandangan hidup/ falsafah hidup bangsa yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. jadi disini maksudnya adalah rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, sehingga pemikiran yang dimiliki pun juga berbeda. Namun demokrasi memberikan hak yang sama untuk berpendapat”.

Berdasarkan pandangan data di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pancasila dipahami dan dikerangkakandalam beberapa pemikiran dasar, yaitu:

1. Demokrasi pancasila sebagai konsep yang beranjak dari konsepsi universal demokrasi yang diterapkan dalam konteks nilai-nilai pancasila.
2. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan dari nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan ideal
3. Demokrasi Pancasila sebagai bentuk interaksi/hubungan manusia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan kehidupan bersama.

Untuk itu berdasarkan kerangka pandangan umum tersebut, maka dilakukan pengkajian secara kuantitatif dan kualitatif terkait tema-tema dan praktik demokrasi pancasila

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para pemilih muda memandang demokrasi pancasila sebahai sistempenyelenggaraan kebaikan bersama yang berazaskan musyawarah dan mufakat, namun dalam praktiknya mengarah pada hal-hal berikut :

1. Demokrasi Pancasila Berorientasi Pada Sistem Pemerintahan Kolektif.
2. Dalam demokrasi pancasila, memilih pemimpin adalah kewajiban warga negara
3. Dalam demokrasi pancasila dimungkinkan ada koalisi dan oposisi
4. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak mutlak
6. Dalam demokrasi pancasila keputusan dibuat mengikuti kehendak bersama
7. Dalam demokrasi pancasila konstitusi adalah wujud musyawarah
8. Kritik terhadap Pemerintah yang Beretika

Saran

Perlu adanya evaluasi dalam pengkajian materi Mapel PPKn. Pendidikan Politik warga negara seyogyanya menjadi materi ajar. Kesadaran dan kecakapan tentang demokrasi pancasila perlu dikuatkan dalam kerangka normative dan praxis.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Almond. A Gabriel dan Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amal, Ichlasul (2008). *Peran Media Massa dalam Menyukkseskan Pemilu 2009*. Paper dipresentasikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Menko Polhukam, di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2008.
- Andersen, Benedict. 2002 (cet.ke-2). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayatrohaedi (penyunting). 1986. *Kepribadian Jiwa Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1967. *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York : Anchor Books.
- Benedanto, Pax (Penyunting), *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi.*, Jakarta: LSPP, 1999.
- Budiardjo, Miriam. 1998 *Partisipasi dan Partai Politik*, edisi revisi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rokeach.1989. *Theories of Mass Communication*, 5th Edition, New York- London : Longman.
- Fagen, Richard R. 11966 *Politics and Communication*, Boston : Little Brown Company.
- Fatah, Eef Saefulloh. 2006. *Puisi Indah, Prosa Buruk: Evaluasi Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan SBY-JK*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Faules, Don F, dan Dennis C. Alexander.1978 *Communication and Social Behavior : A Symbolic Interaction Perspective*, Reading : Addison-Wesley Publishing Company.
- Feith, Herbert. 1999; *Pemilihan Umum1955 di Indonesia*, (edisi terjemahan), Jakarta : KPG.
- Fishman, Mark. 1988. *Manufacturing the News*, Austin : University of Texas Press.

- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, Anthony. 1994. *Living A Post-Traditional Society*. Polity Press, Cambridge.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.
- Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in developing Countries*. (Cambridge: Harvard University Press,1982)
- Kuntowijoyo.1999. *Budaya dan Masyarakat*. Cet.ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan* , Jilid 1. Jakarta: Gramedia
- McNair, Brian. 1995. *An Introduction to Political Communication*, London, Routledge, 1995.
- McQuail, Dennis, dan Sven Windahl. 1996. *Communication Models : for The Study of Mass Communication*, NY : Longman.
- Micklethwait, John & Wooldridge, Adrian. 2007. *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nimmo, Dan. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*, Santa Monica, California: Goodyear Publishing, 1978.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam
- Surjomihardjo, Abdurahman. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Steger, Manfred B. 2002. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Tuchman, Gaye. 1980. *Making News, A Study in the Construction of Reality*, NY : The Free Press.

LEMBAR PEMBAHASAN

Laporan Kemajuan/Akhir*) Penelitian Dasar (Murni) Unesa yang berjudul:

Konstruksi Perilaku Muda Tentang Demokrasi Pancasila

Dengan Pelaksana berikut:

1. Maya Mustika K.S
2. Prof. Dr. Warsno
3. Dr. Rr Nurik S
4. Agus Satmoko, S.S. M.Si
5. _____

telah direview pada hari Senin tanggal 25 November 2019 di Fakult Universitas
Negeri Surabaya

Catatan:

Artikel segera di kirim ke jurnal atau
sewa luaran yg ditargetkan

Surabaya, _____

Reviewer,

Sarmini
Prof. Dr. Sarmini, M. Hum

*) Coret salah satu

PENGESAHAN DARI PEMBAHAS

Laporan Kemajuan/Akhir*) *Penelitian Dasar (Murni)* yang berjudul:

Konstruksi Panitia Muda Tentang Demokrasi Pancasila

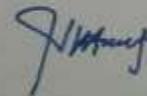
Dengan Pelaksana:

1. Maya Mustika F.S.
2. Prof. Dr. Warsano M.S
3. Dr. Rr. Nanik S.
4. Agus Satrioko A, SS M.Si
5. _____

~~Belum~~/Sudah*) direvisi berdasarkan masukan pembahas.

Surabaya, 1. Desember 2019

Reviewer,



Prof. Dr. Sarmini, M. Hum.

*) Coret salah satu



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor 407/UN38/HK/LT/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN MURNI KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN HUKUM (FISH) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum maka perlu dilakukan penetapan penerima penelitian Murni dana PNBP Universitas Negeri Surabaya Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas maka dipandang perlu menerbitkan keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN MURNI KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM (FISH) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2019.
- KESATU : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penerima Penelitian Murni Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun 2019, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan secara tertulis memberikan laporan kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA : kegiatan Penerima Penelitian Murni Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 30 November 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 5 Maret 2019
 Rektor,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga Unesa
7. Kepala Biro Selingkung Unesa



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
 Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDI AKSO
NIP 196005131980101002

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN MURNI KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 DANA PNPB TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	FAK	JURUSAN /PRODI	JUDUL PENELITIAN	BIDANG ILMU	TIM PENELITI	NIDN/NIP	GOL	PEND.	L/P	WAKTU (BLN)	DANA (Rp.)	SUMBER DANA
1	FISH	PMP-KN - PPKn	Glass Ceiling pada Perempuan Tunggal Kepala Rumah Tangga Berkarir di Sidoarjo	PENDIDIKAN	Dr. Oksiana Jatiningih, M.Si. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Siti Maizul-Habibah, S.Pd., M.A.	196710011992032001 196808081993032002 198912122015042002	IV b IV d III b	S3 S3 S2	P P P	9	Rp 11.000.000,00	UKT
2	FISH	PMP-KN - PPKn	Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Presiden oleh Partai Politik dikota Surabaya	PENDIDIKAN	Drs. I Made Suwanda, M.Si. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, SH., MH. Rahmanu Wijaya, SH., MH.	195707091986011001 198509192015041002 198611092015041002	IV a III b III b	S2 S2 S2	L L L	9	Rp 11.000.000,00	UKT
3	FISH	PMP-KN - PPKn	Self Regulated Learning Mahasiswa Bidik Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	PENDIDIKAN	Dr. Harmanto, M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. M. Turhan Yani, MA Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.	197104012005011001 196304041988121001 197703012002121003 197502202006042002	IV a IV b IV b III c	S3 S3 S3 S2	L L L P	9	Rp 13.000.000,00	UKT
4	FISH	PMP-KN - PPKn	Konstruksi Pemilih Muda di Surabaya tentang Demokrasi Pancasila	PENDIDIKAN	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Prof. Dr. Warsono, M.S. Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.	197405142003122002 196005191985031002 196708251992032001 197208162008011006	III c IV e IV c III b	S2 S3 S3 S2	P L P L	9	Rp 11.000.000,00	UKT
5	FISH	Pend. Geografi - Pend. Geografi	Analisis Perbedaan Kemampuan Keterampilan Dasar Mengajar (Teaching Skills) pada Mahasiswa Calon Guru Geografi ditinjau dari Perspektif Gaya Kognitif Field Independent dan Field Dependent	PENDIDIKAN	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dra. Sulistinah, M.Pd. Drs. Agus Sutedjo, M.Si.	197303032006041002 195609181982032001 195908201990021001	III b IV c IV a	S3 S2 S2	L P L	9	Rp 12.000.000,00	UKT
6	FISH	Pend. Geografi - Pend. Geografi	Strategi Pengembangan Desa Wisata Mojo di Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro melalui Konsep Community Based Tourism (CBT)	PENDIDIKAN	Drs. Agus Sutedjo, M.Si. Dr. Ketut Prasetyo, MS. Dr. Sri Murtini, M.Si.	195908201990021001 196005121986011003 196711021998022001	IV a IV a IV b	S2 S3 S2	L L P	9	Rp 11.000.000,00	UKT
7	FISH	Pend. Sejarah - Pend. Sejarah	Penyebaran Budaya Literasi: Strategi Jaringan Penulis, Penerbit dan Pedagang Buku Boekhandel Tan Khoen Swie, 1953-1963	PENDIDIKAN	Dr. Wisnu, M.Hum. Drs. Artono, M.Hum. Drs. Sumarno, M.Hum. Septina Alrianingrum, SS.,M.Pd.	196405041998021001 196506041993021001 196504241993021001 197209112005012001	IV b IV a IV b III c	S3 S2 S2 S2	L L L P	9	Rp 11.000.000,00	UKT
8	FISH	Pend. Sejarah - Pend. Sejarah	Berpikir Kritis Remaja Osing terhadap Kearifan Lokal Esoterisme Mitos Buyut Gili sebagai Sumber Sejarah Lisan Blambangan	PENDIDIKAN	Dr. Agus Suprijono, M.Si. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Thomas Nugroho Aji, S.IP., M.Si. Drs. Nasution, M.Ed., M.Hum.Ph.D.	196701111992031003 196802151993032002 197308142008011015 196608021992121001	IV c III d III a IV b	S3 S2 S2 S3	L P L L	9	Rp 11.000.000,00	UKT

9	FISH	Pend. Sejarah - Pend. Sejarah	Konstruksi Instrumen Assesmen Ujian Akhir Semester: Pengembangan Soal Ujian Berbasis HOTS untuk Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah	PENDIDIKAN	Thomas Nugroho Aji, S.I.P., M.Si. Dr. Agus Suprijono, M.Si. Dr. Wisnu, M.Hum. Corry Liana, S.Pd., M.Pd.	197308142008011015 196701111992031003 196405041998021001 198204152005012001	III a IV c IV b III b	S2 S3 S3 S2	L L L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT
10	FISH	Pend. Sejarah - Pend. Sejarah	Melacak Perkembangan Ritual Bhairawa di Indonesia: Studi Kebangkitan Kembali Upacara Puja Bhairawa di Pujungan Bali Tahun 2012	PENDIDIKAN	Drs. Nasution, M.Ed., M.Hum.Ph.D. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum, MA. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., MA. Riyadi, S.Pd., MA.	196608021992121001 196712241993031001 198505022015041002 198411122015041002 198606202015041001	IV b IV a III b III b III b	S3 S2 S2 S2 S2	L L L L L	9	Rp	11.000.000,00	UKT
11	FISH	Adm. Publik - S1 Ilmu Adm. Negara	Analisis Kebijakan Anggaran Lingkungan Hidup Menggunakan Model Budget Tagging di Kabupaten Gresik	PENDIDIKAN	Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., M.PA.	198704292015041001 198301192008122002 198312232009122002 197409022008121002 199104092018031001	III b III c III c III c III b	S2 S2 S2 S2 S2	L P P L L	9	Rp	11.000.000,00	UKT
12	FISH	Adm. Publik - S1 Ilmu Adm. Negara	Aksebilitas Transportasi Publik (Studi tentang Peningkatan Layanan Publik melalui Inovasi Suroboyo Bus di Kota Surabaya)	PENDIDIKAN	Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Dra. Meirinawati, M.AP. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	197104281999032001 196805212000032001 197407292005012001 198910252015041001	III d IV a III d III b	S2 S2 S2 S2	P P P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT
13	FISH	Adm. Publik - D3 Adm. Negara	Implementasi Kebijakan Affirmative Action Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Pemilu Tahun 2019	PENDIDIKAN	Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Noviyanti, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc. Gading Gamaputra, S.AP., M.PA.	198506132014042001 197108262006041001 197003052003121001 197601252000032005 197909232009122003 198911182015042002 198706162015041004	III b III c III d III d III c III b III b	S2 S3 S3 S2 S2 S2 S2	P L L P P P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT
14	FISH	Adm. Publik - D3 Adm. Negara	Analisis Pengelolaan Bandar Udara "Abdurachman Saleh" Malang dalam Melayani Masyarakat Dilihat dari Perspektif "Good Governance"	PENDIDIKAN	Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Gading Gamaputra, S.AP., M.PA. Noviyanti, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.	197003052003121001 197108262006041001 197601252000032005 197909232009122003 198506132014042001 198706162015041004 198911182015042002	III d III c III d III c III b III b III b	S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2	L L P P P L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT
15	FISH	Hukum - Ilmu Hukum	Reformulasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hayati pada Kabupaten Konservasi di Probolinggo	PENDIDIKAN	Indri Fogar Susilowati, SH., MH. Tamsil, SH., MH. Elisabeth Septin Puspoayu, SH., MH. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, SH., MH.	197211141998022001 196204031990021001 198809172015042003 198802112015041004	III c III c III b III b	S2 S2 S2 S2	P L P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT
16	FISH	Hukum - Ilmu Hukum	Kesadaran Hukum Penyelenggara Usaha Pemondokan Terkait Kewajiban Kepemilikan Izin Usaha Pemondokan Berdasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Tatacara Penyelenggaraan Usaha Pemondokan	PENDIDIKAN	Dr. Hananto Widodo, SH., MH. Eny Sulityowati, SH., MH. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Muh. Ali Masnun, SH. MH.	197406032005011001 196807301993022001 198110192014041001 0007088801	III c III c III b III b	S2 S2 S2 S2	L P L L	9	Rp	11.000.000,00	UKT

17	FISH	Hukum - Ilmu Hukum	Kajian atas Analisis Hambatan pada Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gresik	PENDIDIKAN	Emilia Rusdiana, SH., MH. Dr. Puji Astuti, SH., MH. Gelar Ali Ahmad, SH., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.H.	197906192006042002 196012271986012001 00100598105 198105242010122004	III c IV b III b III b	S2 S3 S2 S2	P P L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
18	FISH	Hukum - Ilmu Hukum	Strategi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna oleh LP3TK di Kabupaten Blitar Jawa Timur	PENDIDIKAN	Arinto Nugroho, S.Pd., SH., MH. Budi Hermono, SH. MH. Dita Penwitasari, SH., M.Kn. Irfi Renaboyd, SH., MH.	198101032005011002 198003192005011002 198906182018032002 198910292018031001	III c III c III b III b	S2 S2 S2 S2	L L P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
19	FISH	Ilmu Sosial - Sosiologi	Pemanfaatan Waktu Luang (Leisure Time) Mahasiswa Bidik Mini FISH Unesa	PENDIDIKAN	Farif Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Pambudi Handoyo, S.Sos., MA. Ardhie Raditya, S.Sos., MA. Dr. Ari Wahyudi, M.Si	198411052014041001 197609242005011002 198207222008121001 196505101989031004	III b III c III b IV c	S2 S2 S2 S3	L L L L	9	Rp	12.000.000,00	UKT	
20	FISH	Ilmu Sosial - Sosiologi	Implementasi Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Struktur Ekonomi Desa melalui ADD	PENDIDIKAN	Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. Drs. FX. Sri Sadewo, S.Sos., M.Si. Drs. Martinus Legowo, MA. Reffi Handini Listyani, S.Sos., M.Si.	197608162015041001 196505151990021001 195801011985031007 198209042009122001	III b IV b IV b III c	S3 S2 S2 S2	L L L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
21	FISH	Ilmu Sosial - Sosiologi	Krisis Petani Muda: Studi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur	PENDIDIKAN	Dr. Sugeng Harianto, M.Si. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Pambudi Handoyo, S.Sos., MA. Diyah Utami, S.Sos., MM.	196403211993021001 197205012001121002 197609242005011002 198008232008122001	IV a III d III c III b	S3 S2 S2 S2	L L L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
22	FISH	Ilmu Sosial - Ilmu Komunikasi	Implementasi Pengembangan Destinasi Ekowisata Kawasan Pantai Sendang Biru sebagai Sarana Wisata Konservasi	PENDIDIKAN	Puspita Sari Sukardani, ST., M.Med.Kom. Yinda Maya Setianingrum, S.Sos., MA. Mutiah, S.Sos., M.Ikom. Gilang Gusti Aji, S.IP., M.Si.	198311132010122005 198005182015042002 198501132015042002 198806012015041001	III b III b III b III b	S2 S2 S2 S2	P P P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
23	FISH	Ilmu Sosial - Ilmu Komunikasi	Tingkat Partisipasi Politik Perempuan (Analisis Survey pada Tim Pemenangan DPW PKB Jawa Timur)	PENDIDIKAN	Awang Dharmawan, S.Ikom., MA. Putri Aisyiah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom. Gilang Gusti Aji, S.IP., M.Si. Tsuoyya, S.S., M.A.	198807052015041003 198404202014042001 198806012015041001 198302192010122003	III b III b III b III b	S2 S2 S2 S2	L P L P	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
24	FISH	Pend. Geografi - Pend. IPS	Strategi Adaptif Remaja Etnis Ching Menghadapi Globalisasi Budaya	PENDIDIKAN	Ali Imron, S.Sos., MA. Dr. Agus Suprijono, M.Si. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio.	198308082008121004 196701111992031003 196808081993032002 198705162015041002	III c IV c IV d III b	S2 S3 S3 S2	L L P L	9	Rp	11.000.000,00	UKT	
Jumlah												Rp	268.000.000,00	



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan

BUDHANSO
NIP. 196005131980101002

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2019
Rektor,

ttt

NURHASAN
NIP 196304291990021001

fi